

PENERAPAN E-GOVERNMENT DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI MASYARAKAT DI SAMARINDA

Azannanto Sampama¹

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Penerapan E-Government Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat di Samarinda. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2016 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan mewawancarai Kepala Dinas selaku yang memiliki kebijakan dan Humas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selaku yang menjalankan e-Government.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menentukan key informan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana dalam penelitian ini menunjuk ibu Dr. Rini Retno Sukesi, M.kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai key informan dan menunjuk ibu Yuni Wijiastutik selaku humas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Field Work Research dan analisis data model interaktif Miles dan Huberman dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan elemen sukses penerapan e-Government yaitu support dan capacity maka penerapan e-Government Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di Samarinda cukup baik karena telah memiliki fasilitas yang baik untuk menjalankan e-Government namun masih memiliki kekurangan dalam sumber daya manusia yang mengelola e-Government, karena belum adanya sumber daya manusia yang berkompeten didalam bidang IT dan tidak adanya bidang khusus atau team yang mengelola e-Governmnet.

Kata kunci : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, e-Government, Informasi

PENDAHULUAN

Perkembangan media saat ini dapat dikatakan sangat berkembang pesat terutama berkaitan dengan media massa bahkan muncul kalimat hidup ini dikendalikan media massa. Hampir seluruh aktivitas individu tidak lepas dari terpaan atau penggunaan media massa seperti, surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Individu mampu memperoleh informasi yang beragam melalui media-

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: azannantosampama@gmail.com

media tersebut diantaranya bersifat umum sampai memiliki segmentasi khusus.

Banjir informasi yang melanda individu akibat penggunaan media akhirnya mendorong media untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan individu. Media tradisional seperti surat kabar, majalah, radio saat ini mulai bergeser menuju media baru atau media *online* (internet). Pada bagian pemerintah pun juga turut terkena dampak perkembangan teknologi melalui media baru (internet). Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien yang mampu diakses kapanpun dan dimanapun hal ini mendorong munculnya *e-Government* yang digunakan pemerintah sebagai wujud dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang semakin tinggi.

E-Government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Yaitu bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui sebuah portal *web*. Perbedaan pemahaman, cara pandang dan tindakan atas *E-Government* telah menimbulkan distorsi serta penyimpangan atas maksud pembuatan *E-Government* itu sendiri

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur menerapkan pelayanan dengan sistem *e-Government*, yakni pelayanan yang berbasis elektronik baik melalui lelang terbuka maupun memberikan informasi segala bidang kepada publik. Penerapan *e-Government* yang baik dan benar, maka pelayanan pemerintah di Kalimantan Timur berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara cepat, efektif, dan efisien. Apabila pelayanan yang cepat dan efisien itu dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, maka pemerintahan yang baik di Kalimantan Timur akan dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menilai penggunaan sistem *e-Government* dalam memberikan informasi sangat penting karena dewasa ini kalangan masyarakat menggunakan media online sebagai alat untuk mencari informasi yang mereka butuhkan.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Teori Konvergensi Media

Konvergensi pada umumnya berarti persimpangan media lama dan baru seperti yang dikatakan oleh Henry Jenkins pada tahun 2006 menyatakan bahwa konvergensi adalah Aliran konten di *platform* beberapa media, kerja sama antara industri beberapa media, dan perilaku migrasi khalayak media.

Konvergensi media tidak hanya pergeseran teknologi atau proses teknologi, namun juga termasuk pergeseran dalam paradigma industri, budaya, dan sosial yang mendorong konsumen untuk mencari informasi baru. Konvergensi media terjadi dengan melihat bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain pada tingkat sosial dan menggunakan berbagai *platform* media

untuk menciptakan pengalaman baru, bentuk-bentuk baru media dan konten yang menghubungkan kita secara sosial, dan tidak hanya kepada konsumen lain, tetapi untuk para produsen perusahaan media.

Konvergensi media juga mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. Singkatnya, konvergensi mengubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi yang penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan.

Teori konvergensi menyatakan bahwa berbagai perkembangan bentuk media massa terus merentang sejak awal siklus penemuannya. Setiap model media terbaru tersebut cenderung merupakan perpanjangan atau evolusi dari model-model terdahulu, dalam konteks ini internet bukanlah pengecualian.

Konsep

Pengertian Penerapan

Pengertian Penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995:1044) penerapan adalah mempraktekkan dan memasang. Berikut ini adalah unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Media Baru

Media baru merupakan media yang menggunakan internet, media *online* berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 2008; 13).

Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi yang mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang complex dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan media karena media ini adalah sesuatu yang terus selalu berkembang dari media zaman dahulu sampai sekarang yang sudah menggunakan digital. Istilah “media baru” telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam. Kemunculan media baru turut memberikan andil akan perubahan komunikasi masyarakat. Media baru, dalam

hal ini internet sedikit banyak mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Leah dan Sonia (2006:4-7) membedakan karakteristik media baru dari media lama dalam empat aspek, yaitu:

1. *Recombinant*, media baru merupakan hasil ‘kombinasi’ secara kontinyu antara teknologi yang sudah ada dengan inovasi baru, dalam sebuah jaringan teknis dan institusional yang saling terhubung satu sama lain. Tidak seperti media massa yang pada akhir abad ke-20 telah terdiferensiasi dengan stabil ke dalam beberapa saluran atau bentuk (karena kelangkaan spectrum serta pendirian standar teknis dan formal), bentuk dan macam media baru uterus bercabang, berekombinasi serta berkembang.
2. *Networked*, komunikasi dalam media massa bersifat hierarkis, satu arah (*one-way*) dan tersentralisasi (*one to many*), sementara dalam media baru komunikasi bersifat terdesentralisasi dan dua arah (*two-way*). Pengguna media baru saling terhubung dan dapat menjadi pengirim maupun penerima pesan atau keduanya sekaligus.
3. *Ubiquitous*, media baru mempengaruhi setiap orang dalam masyarakat dimana media tersebut digunakan, meskipun tidak setiap orang dalam masyarakat itu menggunakannya. Sementara teknologi media massa biasanya digunakan bersama, teknologi media baru didesain sebagai alat/aksesori personal yang menyediakan akses ke berbagai konten yang bersifat perseorangan atau layanan komunikasi, dimana pun pengguna, layanan atau sumber daya berada.
4. *Interactive*, pengguna media baru dapat memilih sumber informasi mereka dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Memang pengguna media massa juga dapat menerima dan mempertahankan informasi secara selektif, namun media baru juga memberi penggunanya sarana untuk membentuk, mencari, serta berbagi konten secara selektif dan untuk berinteraksi dengan individu dan grup lainnya, dalam skala lebih besar secara praktis dibanding dengan media massa tradisional.

E-Government

Menurut Zoeltom (2004) “*Electronic Government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien” selain itu, ada beberapa definisi *e-Government* dari beberapa lembaga baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang telah dikutip oleh Indrajit (2006:2-3), antara lain:

Definisi lembaga Institusi Non-Pemerintah

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut : *e-Government* mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *Wide Area Network*, internet, dan komputerisasi lainnya yang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk hubungannya dengan warganegara, swasta

atau dunia bisnis, dan pemerintah lainnya. Disisi lain UNDP (*United Nation Development Programer*) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu “pengaplikasian teknologi komunikasi dan informasi oleh pemerintah”. Definisi menarik dikemukakan pula oleh Jim Flyzik (*US Department of Theasury*) ketika diwawancarai oleh Price Waterhouse Coopers, dimana yang bersangkutan mendefinisikan “*e-Government* akan membawa pemerintah bekerja di dalam dunia internet dengan waktu tidak terbatas”

Definisi beragam pemerintahan

Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefenisikan *e-Government* secara singkat, padat, dan jelas, yaitu “*e-Government* mengacu pada pelayanan pemerintah dan informasi secara *online* melalui internet atau alat digital lainnya”. Sementara, Nevada salah satu Negara bagian Amerika Serikat mendefinisikan *e-Government* sebagai “Pelayanan *online* menghapus dinding penghalang antara swasta, masyarakat dan pemerintah melalui pengaksesan yang mudah, murah dan cepat”. Pemerintah New Zeland melihat *e-Government* sebagai sebuah fenomena, *e-Government* adalah suatu metode pemerintah dalam menggunakan teknologi baru untuk menyediakan jalur akses yang lebih mudah untuk pelayanan dan informasi pemerintah, meningkatkan mutu pelayanan dan untuk menyediakan proses dan peluang partisipasi demokrasi yang lebih besar.

Manfaat E-Government

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep *e-Government*, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair di dalam Indrajit (2006:5), telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan ditetapkannya *e-Government* bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisien di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, pengawasan, dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *e-Government*;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administras, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan aktifitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan perkembangan yang ada; serta

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Kebutuhan Informasi

Menurut Murray, kebutuhan adalah sebuah konstruk yang menunjukkan “sebuah dorongan dalam wilayah otak” yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran, dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Sebuah kebutuhan dapat diakibatkan oleh proses internal namun lebih dari sepuluh distimulasi oleh faktor lingkungan. Secara umum, sebuah kebutuhan disertai oleh perasaan tertentu atau emosi dan ia memiliki sebuah cara khusus mengekspresikan dirinya dalam mencapai resolusi (Murray, 1938:123-125)

Davis dalam Abdul Kadir (2003:28) menjelaskan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan informasi timbul ketika pengetahuan yang dimiliki seseorang kurang dari yang dibutuhkan, sehingga mendorong seseorang untuk mencari informasi.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-Government* Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam berupaya menciptakan sarana interaksi modern yang baik melalui media teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemerintahan agar efektif dan efisien. Kemudian peneliti membatasi masalah dengan menggunakan 2 elemen yaitu *Support* dan *Capacity*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Whitney (Kaelan 2005:58) mengatakan bahwa, “Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis”.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari penelitian ini yaitu “Penerapan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di Samarinda”, adalah sebagai berikut:

1. Support

Support merupakan suatu elemen dimana Pemerintah merupakan unsur yang paling penting dalam mendukung penuh penerapan *e-Government* secara finansial, tenaga, informasi dan lain lain juga disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada

seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. *Capacity*

Capacity yaitu elemen kedua yang merupakan unsur kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-Government* meliputi ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Menurut Moleong (2001:90), "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian". Pemilihan informan ini didasarkan pada subjek yang memiliki banyak informasi berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data".

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:216). *Key informan* berasal dari pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang mana dalam penelitian ini penulis menunjuk ibu Dr. Rini Retno Sukesni, M.kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai *key informan* dan menunjuk ibu Yuni Wijiastutik selaku humas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai *informan*.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *Field Work Research* yaitu, melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden untuk melaksanakan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi (Ruslan 2010:31).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian itu berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis (*interview model of analysis*) dikembangkan oleh Mathew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana (2014).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Sejarah singkat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kurang lebih tahun 1960, dibawah naungan Menteri Kesehatan dibentuklah Inspeksi Kesehatan (IKES) yang di pimpin oleh Dr. TAAN pertama kali di KaliTim.

Seiring dengan waktu dan perkembangan Sistem pemerintahan Republik Indonesia serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang mencakup lintas wilayah, maka pada tahun 1976 Menteri Kesehatan memecah (IKES) menjadi dua instansi yaitu Kantor Wilayah Departemen

Kesehatan yang berada di setiap wilayah masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia, dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan, sedangkan Instansi yang kedua bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dimasing-masing wilayah dan disebut Dinas Kesehatan Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2000 Perubahan Kabinet pemerintah mempengaruhi perubahan fungsi kedua Instansi bidang Kesehatan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Hilangnya Struktur Menteri Kesehatan dalam kabinet Negara Republik Indonesia membuat perubahan besar terhadap status kepegawaian Kanwil Depkes Provinsi Kaltim. Saat itu Kanwil Depkes dan Dinkes Tk. I Dihapuskan dan dilakukan penggabungan kepegawaiannya, seluruh Status Kepegawaian dua instansi Pusat dan Daerah tersebut diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Sehingga Dibentuklah Instansi bidang kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan diberi nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini.

Dengan hilangnya Kanwil Depkes Provinsi Kalimantan Timur maka segala urusan serta koordinasi bidang kesehatan menjadi vertikal terhadap Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga program kerja dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini berada dibawah naungan Gubernur Kalimantan Timur bertambah besar terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya, serta koordinasi terhadap Kabinet Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada umumnya.

Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beralamatkan di Jl. AW. Syahrani, Gn. Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pelayanan mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WITA. Pada saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh ibu dr. Rini Retno Sukei, M.Kes yang telah menjabat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2012 hingga saat ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun suatu program dan melaksanakannya hal ini, bertujuan agar masyarakat dapat merasakan hasil yang positif dari serangkaian program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangnya media informasi dan adanya undang – undang mengenai keterbukaan informasi publik membuat pemerintah untuk

mengembangkan media untuk memberikan informasi – informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Media *online* saat ini banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat. Ini membuat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan media *online* atau yang sering disebut dengan internet. Banyak media *online* yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi. Saat ini media *online* juga bisa untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan waktu yang tidak terbatas.

Media *online* pada saat ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat memanfaatkan media *online* (internet) atau digital dalam kehidupan saat ini. Masyarakat mulai merubah gaya dan budaya dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Ini membuat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur harus fokus mengembangkan media internet sebagai alat penyebaran informasi kepada masyarakat.

Konvergensi media terjadi dengan melihat bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain pada tingkat sosial dan menggunakan berbagai platform media untuk menciptakan pengalaman baru, bentuk – bentuk baru media dan konten yang menghubungkan manusia secara sosial. Ini membuat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menambah dan mengembangkan dari media lama ke media baru dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Penerapan *e-Government* pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur termasuk memberikan atau menyajikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya.

Support

Support merupakan suatu elemen dimana Pemerintah merupakan unsur yang paling penting dalam mendukung penuh penerapan *e-Government* secara finansial, tenaga, informasi dan lain lain juga disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dimana bertugas mengurus kesehatan masyarakat, oleh karena itu pemerintah pun memberikan fasilitas fasilitas untuk menunjang kinerja dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mulai memakai media *online* atau internet dalam menyebarkan informasi pada pertengahan tahun 2012 tepatnya bulan Juni. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan media *online* dengan tujuan sebagai alat dalam menyebarkan informasi agar informasi dan kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di ketahui oleh masyarakat Samarinda dan luar Samarinda. Semakin berkembangnya era globalisasi dan undang – undang tentang keterbukaan informasi publik

mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk merealisasikan media baru sebagai perantara atau media yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Media baru seperti *e-Government* saat ini lagi gencar dikembangkan oleh pemerintah guna dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan, membantu meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab. Bentuk *support* yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa dialokasikannya sejumlah sumber daya salah satunya yaitu adalah sumber daya finansial. Sumber daya finansial ini diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk membangun *e-Government* demi menunjang penyebarluasan informasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kemudian pemerintah membangunkan infrastruktur demi menunjang *e-Government* yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berupa dibuatkannya peraturan perundang-undangan dan intruksi Presiden Republik Indonesia.

Capacity

Capacity yaitu elemen kedua yang merupakan unsur kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-Government* meliputi ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai.

Dalam mewujudkan *e-Government* Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memumpuni. Mumpuni disini dalam artian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki infrastruktur-infrastruktur yang menunjang kinerja *e-Government* dan bisa dinilai bahwa infrasturktur itu sendiri sudah cukup baik. Infrastruktur yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yaitu berupa adanya jaringan internet yang kuat, jaringan internet yang kuat ini di suply oleh perusahaan telekomunikasi negara sebagai bentuk kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-Government*, pemerintah setempat disini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Selain kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan jaringan internet yang kuat mereka juga menyediakan perangkat komputer dan perangkat-perangkat pendukung lainnya yang berguna untuk menjalankan *e-Government* pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai yang mengelola *e-Government* sudah cukup baik dan mampu untuk menjalankan *e-Government*.

Namun dalam penerapan *e-Government* pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki hambatan pada sumber daya manusia yang mengelola *e-Government* tersebut. Hambatan yang terjadi pada sumber daya manusia yang mengelola *e-Government* tersebut tidak memiliki basic ilmu pengetahuan dibidang teknologi informasi dan tidak adanya bidang khusus yang

ditunjuk untuk mengurus dan menjalankan serta berfokus pada penerapan *e-Government*. Hal tersebut diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bahwa memang yang terjadi di lapangan tidak adanya staf khusus

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. *Support*

Pemerintah memberikan dukungan dalam penerapan *e-Government* pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berupa fasilitas, infrastruktur dan suprastruktur. Itu menunjukkan bahwa pemerintah mendukung penuh penerapan *e-Government* di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

2. *Capacity*

Sumber daya manusia yang mengelola *e-Government* di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur kurang berkompeten dibidangnya yang menyebabkan informasi yang diberikan melalui *website* masih kurang terfokus.

Saran

1. Dari fakta yang ada di lapangan pemerintah memberikan anggaran untuk membuat dan perawatan *e-Government* hanya pada awalnya saja, kemudian tak ada anggaran lagi untuk melakukan pemeliharaan, Saran untuk pemerintah selaku yang mempunyai kemampuan memberikan dukungan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, akan lebih baik jika adanya alokasi dana yang berkelanjutan guna pengembangan dan perawatan untuk *e-Government*.
2. Dengan tidak tertatanya informasi yang diberikan melalui *e-Government* sehingga terkesan masih seadanya dan tidak dikelola dengan baik dan profesional sehingga menjadikan penulis berfikir untuk memberikan saran kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selaku yang mengelola *e-Government* agar dibentuknya bidang atau team yang mengurus atau mengelola secara fokus *e-Government*. Karena *e-Government* merupakan media masa depan yang akan mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam mencari dan menyebarkan informasi.

Daftar Pustaka

- Ali, Lukman. Dkk. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke-dua)*. Jakarta : Perum Balai Pustaka
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta : Andi.
- Jenkins, Henry. 2006. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
- Leah, Lievrouw dan Sonia Livingstone. 2006. *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. London: Sage Publications Ltd.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.